

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, H. Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Chomzah, H. Ali Achmad, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid I*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

HS, Salim, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2016, *Teknik Pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hadjon, M Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Harsono, Budi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ismaya, Samun, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak*, UI Press, Jakarta.

Lubis, Irwansyah, Anhar Syahnel dan Muhammad Zuhdi, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mulyadi, 2011, *Hukum Warisan Wasiat*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mustofa, 2010, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, KaryaMedia, Yogyakarta.
- Nasution, 2003, *Metode Research*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Parlindungan, A.P, 1982, *Pedoman Pelaksanaan dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Praktik Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1979, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan VII, Sumur, Bandung.
- Purnamasari, 2021, Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Rijan, Yunirman dan Ira Koesoemawati, 2009, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian Cetakan ke-10*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sulhan, Irwansyah Lubis dan Anhar Syanel, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Metode Penelitian Ilmiah*, Angkasa, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutopo, Ariesto Hadi, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 1991, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato)*, Agung Pers, Semarang.

Wibawanti, Erna Sri, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.

Yamin, Muhammad dan Abd. Rahim Lubis, 2004, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

## **B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi**

Abikusno, R.M Rahyono, Putusan Provisionil Dan Pengetrapannya Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

Lestari, Tri Wahyuni Surya, Komparisi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” dalam perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018.

Putro, Widodo Dwi dan Ahmad Zuhairi, “Menimbang Prinsip “Duty of Care” Pembeli Melawan Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Tanah”, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2017.

Suraningsih, “Pembatalan Akta PPAT melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor:95/Pdt.G/2009/PN.Klt di Pengadilan Negeri Klaten), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Suratinoyo, Titha AN, “Sengketa Harta Yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan”, *Lex*

*Privatum*, Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.

### C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia, Staatsblad* 1847 Nomor 23. Terjemahan R. Subekti & R. Tjitrosudibio Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.